

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN

(Studi pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)

Safrida Hanum¹, Edi Zulfiar² dan Neo Agustina³

^{1,2} Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe

³ Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of internal control system of government and understanding of accounting information system to financial performance at North Aceh District Office and Government Agency. Data used in this research is primary data by dividing questionnaire to 104 employees as sample of research. Data processing is done through multiple linear equations model. The results showed that: Partially, the government's internal control system significantly influences the financial performance at North Aceh District Office and Government Agency. Understanding of accounting information system has a significant effect on financial performance at North Aceh District Office and Government Agency. Simultaneously, the government's internal control system and the understanding of accounting information system have a significant effect on financial performance at North Aceh District Office and Government Agency. The government's internal control system and the understanding of accounting information systems have a very strong relationship with the financial performance at North Aceh District Office and Government Agency. The government's internal control system and the understanding of the accounting information system have the ability to explain the impact on financial performance at North Aceh District Office and Government Agency of 77.9%. While the rest is influenced by other variables outside this research model.

Key Words : *Internal Control System, Accounting Information System, Financial Performance.*

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Adapun misi utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan.

Pemerintah terus mewujudkan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*) antara lain perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian internal organisasi (Mahmudi, 2007:27).

Pengendalian internal merupakan pelaksanaan (tindakan langsung) dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu suatu organisasi atau kantor pemerintahan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan suatu proses dari kinerja keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 ayat 96 disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Oleh karena itu pemerintah daerah yang merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, dan meluasnya dunia usaha, maka di zaman sekarang ini telah banyak diterapkan sistem informasi akuntansi untuk mengelola data dan informasi. Pembukuan tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi telah menggunakan sistem yang telah terintegrasi. *Auditor* seringkali merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan yang berskala besar dan menggunakan banyak data, yang dikhawatirkan akan berdampak

pada terlambatnya penyelesaian laporan audit.

Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan keuangan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan.

Pembuat laporan keuangan sangat dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBK sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Rendahnya kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu

dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum di Kabupaten Aceh Utara masih mempunyai kelemahan terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam indikatornya menunjukkan efektivitas masih di bawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan kabupaten Aceh Utara yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target (Modus Aceh, 28 Mei 2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edi Fannur (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian Yuliah Mutmainah (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua penelitian terdahulu di atas, penulis menduga bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Penulis ingin memperdalam penelitian yang dilakukan oleh Edi Fannur (2015) dan Yuliah Mutmainah (2013) dengan berpedoman pada Pasal 315 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Qanun Kabupaten

Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, peneliti ingin mengkaji perubahan yang terjadi dalam sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman sistem informasi akuntansi dan kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengangkat judul "Pengaruh Sistem Pengendalian internal Pemerintah dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)".

B. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian merupakan pelaksanaan (tindakan langsung) dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu suatu organisasi atau kantor pemerintahan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan organisasi. Menurut Azhar Susanto (2008:95) pengendalian internal yaitu Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan pegawai yang dirancang untuk memeberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dirancang melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem

pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut: Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur (Standar) yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Mulyadi (2008:177) menyatakan bahwa keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian internal akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan. Jika pengendalian intern akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan organisasinya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalan. Sistem pengendalian internal akuntansi yang lemah akan mengakibatkan kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya, informasi

akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi.

Menurut Hadari Nawawi (2002:137) pengendalian internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor privat karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pada pasal 17 menyatakan : ayat (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; ayat (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan; ayat (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Santoyo Gondodiyoto (2009:160), unsur-unsur sistem pengendalian internal sangat penting karena sistem mempunyai beberapa

unsur dan sifat-sifat tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan dapat dipercayainya data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva dan catatan perusahaan. Setiap unsur mempunyai kaitan langsung dengan tujuan pengendalian internal serta langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenuhinya.

Pengendalian akuntansi menurut Zaki Baridwan (2000:47) adalah pengendalian akuntansi yang terdiri dari struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan finansial, dan konsekuensinya, organisasi, prosedur, dan catatan-catatan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup dalam arti:

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) manajemen yang umum maupun yang khusus.
2. Transaksi-transaksi dicatat untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva.
3. *Acces* (penggunaan) aktiva hanya diperbolehkan bila sesuai dengan otorisasi manajemen.
4. Tanggung jawab akan aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan-perbedaan.

2. Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Wawan Sukmana dan Lia Anggraini (2009) bahwa SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengendalian internal pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko.

- a. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
- b. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (1) Identifikasi risiko; dan (2) Analisis risiko.
- c. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah

menetapkan: (1) Tujuan instansi pemerintah, dan (2) Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Undang-undang.

3. Kegiatan pengendalian.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara Tertulis.
- e. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.
5. Pemantauan pengendalian internal. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian internal. Pemantauan Sistem Pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Gunanya untuk mencari informasi yang lengkap mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun kuesioner dan pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun kisi-kisi daftar pertanyaan dengan merumuskan item-item pertanyaan tertulis disertai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.
- 2) Setiap kuesioner telah diberi petunjuk dalam pengisian.

- 3) Penetapan pemberian nilai untuk setiap item pertanyaan yang diberi bobot nilai sangat setuju (SS) = 5, setuju (S) = 4, kurang setuju (KS) = 3, tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (STS) = 1.
- 4) Kepada pegawai diberi kebebasan dalam menjawab kuesioner sesuai dengan kondisi dimana responden tersebut bekerja.
- 5) Responden mempunyai kebebasan untuk merahasiakan identitas dirinya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini terlihat bahwa pengendalian internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengendalian internal yang dilaksanakan akan memberi dampak

semakin baik kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pimpinan Instansi Pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, menetapkan tujuan instansi pemerintah, dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Undang-undang. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Di samping itu pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan komunikasi atas informasi secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah juga wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edi Fannur (2015) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

2. Pengaruh Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini karena pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah merancang sistem informasi akuntansi sedemikian rupa yaitu berupa SIMDA agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut BKP (2008) manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai berikut : (1) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama; (2) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan (3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana: *output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan *output* dapat disajikan

berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

Pemahaman sistem informasi akuntansi dapat mendukung kualitas laporan keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan pemahaman sistem informasi akuntansi yang baik. Dalam hal ini, Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliah Mutmainah (2013) yaitu bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Secara simultan sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar 77,9%. Sedangkan sisanya 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, sistem pengelolaan keuangan, dan lain-lain.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Secara parsial sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Secara simultan sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- 4) Sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- 5) Sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar 88%. Sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Almanda Primadona. (2008). Pengaruh Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal: Akuntansi*.
- Azhar Susanto. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Lingga Jaya.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2008). *Kode Etik dan Standar Audit*”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Edi Fannur (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Skripsi, STIE Lhokseumawe.
- Hadari Nawawi. (2010). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada. University press.
- Imam Ghozali.(2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyo Gitosudarmo dan Basri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal Hasan. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor selatan Ghalia Indonesia.
- Irham Fahmi. (2010). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- James A. Hall. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H.M. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, *Yogyakarta:Andi*.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Modus Aceh. *Paripurna DPRK Aceh Utara; Satu Sidang Segudang Temuan*. 28 Mei 2015.
- Muslich. (2000). *Manajemen Keuangan Modern: Analisis, Perencanaan, dan Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara Bekerjasama dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengendalian internal Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang APBK Aceh Utara Tahun 2015.
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rama, D.V, dan Jones, F.L. (2006). *Accounting Information Systems*. Publishing. Roff, J. T, South-stern College.
- Romney, B. marshall dan Steinbart, Paul Jhon. (2004). *Accounting Information Systems, International Edition, Ninth Edition*, Prentice Hall, New Jersey
- Santoyo Gondodiyoto. (2009). *Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi*. Jakarta: Nitra Wacana Media.
- Singgih Santoso. (2002). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sri Mifti, Nugroho Budi Lestario dan Anacostia Kowanda .(2009). *Pengendalian internal dan Kinerja (Suatu Kajian di Kantor Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri)*, Jurnal: *Ekonomi*, No. 3 Vol. 14, Agustus 2009.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi Prawirosentono. (2000). *Manajemen Operasi Analisis dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sydney Siegel dan Jhon N. Castelan. (2004:199). *Nonparametric for the Behavioral Science* Second Edition. McGraw: Hill International Edition Singapore.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wawan Sukmana dan Lia Anggraini. (2009). *Pengaruh Pengendalian internal dan pelaksanaan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada satuan Perangkat kerja Daerah Kota Tasikmalaya)*. Jurnal: *Akutansi*, Vol. 4 No. 1, 2009.
- Yuliah Mutmainah. (2013). *Pengaruh Sistem Informasi Akutansi Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo*. Jurnal: *Akutansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Zaki Baridwan. (2000). *Intermedite Accounting*. Yogyakarta: BPF.